

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Penyusunan anggaran dalam sektor pemerintah diantaranya adalah pemerintah daerah merupakan hal yang wajar untuk dipublikasikan anggarannya, karena anggaran tersebut harus diinformasikan kepada publik dan didiskusikan untuk mendapatkan masukan mengenai anggaran tersebut. Berbeda dengan sektor swasta yang informasi anggarannya dirahasiakan. Anggaran yang terdapat di sektor pemerintahan adalah proses suatu penentuan jumlah alokasi dari program dan aktivitas-aktivitas yang akan direalisasikan. Menurut Hansen dan Mowen (2004) dalam Hafiz (2007), anggaran adalah “rencana keuangan untuk masa depan, rencana tersebut mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya”. Perancangan anggaran disusun dengan kerjasama dan partisipasi penuh dari pimpinan pada semua tingkatan karena anggaran yang bersifat partisipatif akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai.

Dalam sektor publik anggaran merupakan gambaran dari akuntabilitas sektor pemerintahan yang diperoleh dari lembaga-lembaga publik. Partisipasi anggaran yang dimaksud dalam penelitian ini melibatkan pimpinan level menengah dan level bawah pada tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan

terlibatnya aparat pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran akan sangat dibutuhkan suatu komunikasi antara atasan dan bawahan untuk saling menukar informasi. Karena manajer bawah mengetahui kebutuhan masyarakat dilapangan sesuai tugas pada bagiannya dan informasi yang dimiliki lebih akurat.

Partisipasi dalam penyusunan anggaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja seorang manajerial di suatu perusahaan publik. Pencapaian kinerja dalam anggaran akan terlihat dari rencana strategis tercapai dan tujuan dari anggaran tersebut tercapai. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama (Veithzal dan Ahmad, 2009:14).

Dalam pencapaian rencana strategis dan pencapaian dari tujuan anggaran di dalam pemerintahan daerah pegawai di rotasi kerja pada umumnya dikarenakan pergantian pemimpin. Dengan adanya rotasi kerja dengan tujuan memberikan motivasi lebih untuk meningkatkan kinerja. Rotasi kerja (*job rotation*) memiliki peranan yang penting sebagai faktor yang terlibat dalam peningkatan kinerja. Selain dapat memicu peningkatan kinerja aparat pemerintah daerah dapat pula menjadi suatu motivasi karyawan dalam bekerja sehingga kinerja aparat pemerintah daerah tersebut akan memiliki beragam pengalaman, pengetahuan yang mampu mengembangkan potensi diri dan mempermudah pengembangan, dan peningkatan pemerintah daerah. Menurut Mourdoukoutas (1994) dalam Fatmawati *et al.* (2012) menyatakan bahwa rotasi pekerjaan merupakan salah satu

pilihan bagi organisasi agar pegawainya dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi kerja.

Partisipasi dalam penyusunan anggaran juga akan lebih efektif jika sesuai dengan *job relevant information*(JRI), karena *job relevant information* merupakan salah satu variabel yang dapat memprediksi lingkungan dan juga tindakan yang lebih selektif. *Job relevant information* meningkatkan kinerja melalui pemberian perkiraan yang lebih akurat mengenai lingkungan sehingga dapat dipilih rangkaian tindakan efektif yang terbaik (Kren, 1992 dalam Hafridebri, 2013). Oleh karena itu, dengan adanya *job relevant information* akan mempermudah manajer untuk memprediksi lingkungan secara tepat.

Penelitian yang berhubungan dengan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Pada sektor publik, penelitian yang dilakukan Siskawati (2004); Sardjito dan Osmad (2007) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Sedangkan, Locke dan Bryan (1997) dalam Endang (2007); Sumarno (2009) membuktikan adanya pengaruh negatif antara partisipasi anggaran terhadap kinerja. Hasil penelitian yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa hasil temuan mereka yang berbeda dan tidak konsisten. Untuk itu, pendekatan kontijensi akan diadopsi untuk mengevaluasi keefektifan hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti ingin meneliti mengenai “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dengan Rotasi Pekerjaan dan *Job Relevant Information* Sebagai Variabel Moderating”.

## **1.2 Perumusan dan Batasan Masalah**

### **1.2.1 Perumusan Masalah**

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah?
2. Apakah dengan adanya *job relevant information* dan rotasi pekerjaan dapat memoderasi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah?

### **1.2.2 Batasan Masalah**

Mengenai penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, maka peneliti memfokuskan kepada masalah yang akan diteliti, agar masalah yang akan diteliti memiliki arah yang jelas. Berikut adalah batasan masalah yang ditentukan oleh peneliti adalah:

1. Penelitian ini dilakukan pada beberapa pemerintah daerah yang dapat mewakili seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
2. Terdapat empat variabel dalam penelitian ini, yaitu partisipasi penyusunan anggaran, kinerja aparat pemerintah daerah, rotasi pekerjaan, dan *job relevant information*.
3. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke setiap SKPD yang mewakili seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Responden penelitian ini adalah sebagai setingkat Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial yang diterapkan pada organisasi sektor publik.
- 2) Untuk mengetahui sejauh mana rotasi pekerjaan sebagai variabel moderating mempengaruhi partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial yang diterapkan pada organisasi sektor publik
- 3) Untuk mengetahui sejauh mana *Job Relevant Information* sebagai variabel moderating mempengaruhi partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial yang diterapkan pada organisasi sektor publik.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, serta tujuan penelitian, maka maka manfaat dari penelitian ini adalah:

##### **1.3.2.1 Manfaat Teoretis**

Penelitian ini memberi kontribusi dalam perkembangan ilmu akuntansi sektor publik tentang bagaimana rotasi pekerjaan dan *job relevant information* memoderat partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dimana dalam hal ini adalah manajer menengah ke manajer bawah.

### **1.3.2.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja dan diharapkan dapat memberikan evaluasi dan masukan dalam upaya meningkatkan kinerja manajerial di pemerintahan daerah demi tujuan peningkatan pertumbuhan pembangunan daerah dan mencapai tujuan anggaran yang diinginkan.